

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018
TERKAIT PEMBENTUKAN BUMDESA DI 36 DESA
KABUPATEN BINTAN**

**Oleh
Reynaldi Kurniawan
NIM. 180563201129**

ABSTRAK

Kabupaten Bintan menjadi salah satu Kabupaten yang membuat kebijakan dimana semua Desa yang ada di Kabupaten Bintan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Terdapat 1 Desa yang bermasalah dalam hal pembentukan dan masalah internal BUMDesa, tidak meratanya sumber daya manusia berkualitas, terdapat hambatan dalam perbaruan pedoman terbaru. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Kabupaten Bintan tahun 2018 terkait pembentukan BUMDesa di 36 Desa Kabupaten Bintan serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam BUMDesa. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu didalam standar dan sasaran kebijakan pelaksanaan pembentukan BUMDesa sudah diperbarui ke Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dan kebijakan ini sudah tepat sasaran. Dari 3 sumber daya hanya sumber daya manusia yang belum optimal dikarenakan kualitas tidak merata secara keseluruhan. Hubungan antar organisasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan dengan Pemerintah Desa dan pengelola BUMDesa cukup baik tetapi terdapat tidak sinkronnya antara Pemerintah Desa dengan pengelola BUMDesa terkait peraturan terbaru dan unit usaha. Kondisi sosial, ekonomi dan politik sudah cukup optimal dilihat keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Disposisi implementor dilihat dari respon implementor sudah cukup baik terkait pembentukan BUMDesa ini, tetapi terkait pemahaman implementor masih belum optimal. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu dari 4 Desa yang diteliti terdapat 1 Desa tidak sesuai pembentukan BUMDesa, sumber daya manusia didalam BUMDesa belum cukup berkualitas, dan masih terdapat tidak sinkronnya pemahaman pedoman terbaru antara pengurus Desa dengan pengelola BUMDesa, serta pemahaman dan kualitas individu pengurus BUMDesa belum cukup baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BUMDesa, Potensi Desa

**IMPLEMENTATION OF BINTAN DISTRICT POLICY IN 2018
REGARDING THE ESTABLISHMENT OF BUMDESA IN 36 VILLAGES
BINTAN DISTRICT**

By

**Reynaldi Kurniawan
NIM. 180563201129**

ABSTRACT

Bintan Regency is one of the Regencies that makes a policy in which all villages in Bintan Regency form Village-Owned Enterprises. There is 1 Village that has problems in terms of the formation and internal problems of BUMDesa, there is an uneven distribution of quality human resources, and there are obstacles in updating the latest guidelines. The purpose of this study was to find out the implementation of the Bintan Regency policy in 2018 regarding the establishment of BUMDesa in 36 villages in the Bintan Regency and to describe the supporting and inhibiting factors in BUMDesa. This research method is a descriptive qualitative research approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The result of this study is that the standards and objectives for implementing the policy for establishing BUMDesa have been updated to Government Regulation Number 11 of 2021 and PDTT Village Ministry Regulation Number 3 of 2021 and this policy is on target. Of the three resources, only human resources are not optimal due to uneven overall quality. Inter-organizational relations between the Bintan Regency Village Community Empowerment Service and the Village Government and BUMDesa managers are good but there is an asymmetry between the Village Government and BUMDesa managers regarding the latest regulations and business units. The social, economic, and political conditions are quite optimal in terms of the involvement and support of the Regional Government. The implementor's disposition, seen from the implementor's response, is quite good regarding the establishment of this BUMDesa, but regarding the implementor's understanding, it is still not optimal. The conclusion of the results of this study is that of the 4 villages studied, there is 1 village that is not suitable for the formation of BUMDesa, the human resources within BUMDesa are not of sufficient quality, and there is still an asynchronous understanding of the latest guidelines between Village administrators and BUMDesa managers, and the understanding and quality of individual BUMDesa administrators is not good yet.

Keywords: Policy Implementation, BUMDesa, Village Potential